



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI II DPR RI

**(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 - 2024
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 16 Mei 2024
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Melanjutkan Rapat Pada Hari Senin Tanggal 1 April 2024 dalam rangka Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 27 (dua puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Dalam Negeri RI C. KPU RI D. Bawaslu RI E. DKPP RI

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda melanjutkan rapat Pada Hari Senin Tanggal 1 April 2024 dalam rangka evaluasi tahapan pemilu serentak tahun 2024, hari Kamis, 16 Mei 2024, dibuka pukul 13.51 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI,

dan DKPP RI, dengan agenda melanjutkan rapat Pada Hari Senin Tanggal 1 April 2024 dalam rangka evaluasi tahapan pemilu serentak tahun 2024, yaitu:

1. Laporan Dana Awal Kampanye (DAK):

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	27 November 2023, Pukul 22.05 WIB
2.	H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	27 November 2023, Pukul 16.06 WIB
3.	H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. - Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD	27 November 2023, Pukul 18.57 WIB

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	WAKTU PENYAMPAIAN	NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7 Januari 2024, Pukul 15.50 WIB	10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7 Januari 2024, Pukul 20.02 WIB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7 Januari 2024, Pukul 01.45 WIB	11.	Partai Garda Republik Indonesia	7 Januari 2024, Pukul 19.27 WIB
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7 Januari 2024, Pukul 16.22 WIB	12.	Partai Amanat Nasional	7 Januari 2024, Pukul 12.08 WIB
4.	Partai Golongan Karya	7 Januari 2024, Pukul 16.40 WIB	13.	Partai Bulan Bintang	7 Januari 2024, Pukul 13.20 WIB
5.	Partai NasDem	7 Januari 2024, Pukul 22.10 WIB	14.	Partai Demokrat	7 Januari 2024, Pukul 20.00 WIB
6.	Partai Buruh	7 Januari 2024, Pukul 12.48 WIB	15.	Partai Solidaritas Indonesia	7 Januari 2024, Pukul 05.44 WIB
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7 Januari 2024, Pukul 01.46 WIB	16.	Partai Perindo	7 Januari 2024, Pukul 15.49 WIB
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6 Januari 2024, Pukul 21.55 WIB	17.	Partai Persatuan Pembangunan	7 Januari 2024, Pukul 21.26 WIB
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	7 Januari 2024, Pukul 14.57 WIB	18.	Partai Ummat	7 Januari 2024, Pukul 18.59 WIB

2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK):

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar	28 Februari 2024 Pukul 15.08 WIB
2.	H. Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	29 Februari 2024 Pukul 20.42.08 WIB
3.	H. Ganjar Pranowo , S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD	29 Februari 2024 Pukul 21.44 WIB

NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	WAKTU PENYAMPAIAN	NO.	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	27 Februari 2024 Pukul 23.56 WIB	10.	Partai Hati Nurani Rakyat	29 Februari 2024 Pukul 17.29 WIB
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	28 Februari 2024 Pukul 00.18 WIB	11.	Partai Garda Republik Indonesia	29 Februari 2024 Pukul 23.13 WIB
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	29 Februari 2024 Pukul 12.51 WIB	12.	Partai Amanat Nasional	27 Februari 2024 Pukul 19.33 WIB
4.	Partai Golongan Karya	29 Februari 2024 Pukul 17.20 WIB	13.	Partai Bulan Bintang	28 Februari 2024 Pukul 14.50 WIB
5.	Partai NasDem	27 Februari 2024 Pukul 11.46 WIB	14.	Partai Demokrat	27 Februari 2024 Pukul 17.50 WIB
6.	Partai Buruh	28 Februari 2024 Pukul 00.49 WIB	15.	Partai Solidaritas Indonesia	29 Februari 2024 Pukul 23.37 WIB
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	28 Februari 2024 Pukul 21.48 WIB	16.	Partai Perindo	28 Februari 2024 Pukul 22.07 WIB
8.	Partai Keadilan Sejahtera	27 Februari 2024 Pukul 17.33 WIB	17.	Partai Persatuan Pembangunan	29 Februari 2024 Pukul 17.14 WIB
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	28 Februari 2024 Pukul 16.24 WIB	18.	Partai Ummat	27 Februari 2024 Pukul 10.32 WIB

3. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara:

- Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung di 820.161 TPS di Dalam Negeri dan 2.538 TPSLN/KSK/POS di Luar Negeri
- Dengan jumlah pemilih sebagai berikut: 203.056.748 pemilih di dalam negeri dan 1.365.433 pemilih di luar negeri.

<p align="center">PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019</p> <p>Jumlah PSU : 1.114 TPS Jumlah PSL : 2.293 TPS Jumlah PSS : 384 TPS Total : 3.791 TPS (0,46%)</p> <p>Daerah yang melakukan PSU, PSL, dan PSS pada tahun 2019 tersebar di 34 Provinsi, 280 Kabupaten/Kota, 592 Kecamatan dan 770 Desa</p>	 <p>Turun dibandingkan Tahun 2019</p>	<p align="center">PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024</p> <p>Jumlah PSU : 738 TPS Jumlah PSL : 117 TPS Jumlah PSS : 258 TPS Total : 1.113 TPS (0,13%)</p> <p>Daerah yang melakukan PSU, PSL, dan PSS tersebar di 38 Provinsi, 225 Kabupaten/Kota, 427 Kecamatan dan 561 Desa/Kelurahan yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari – 24 Februari 2024</p>
---	--	--

4. Data penanganan perkara sepanjang tahun 2023 s.d. bulan Maret 2024 menunjukkan terdapat 587 penyelenggara pemilu yang telah diputus oleh DKPP. Sebanyak 300 orang (51,1 persen) direhabilitasi, 281 orang (47,9 persen) dijatuhi sanksi, dan enam orang (1 persen) diberikan ketetapan.
5. Isu-isu krusial dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 yaitu:
 - a. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.
 - b. Penyusunan Peraturan KPU.
 - c. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - d. Pencalonan DPD.
 - e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
 - f. Masa Kampanye Pemilu.
6. Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang paling banyak dilanggar dalam tahapan Pemilu 2024 yaitu profesionalisme.
7. Perkara kategori non-tahapan pemilu perlu menjadi refleksi dan bahan evaluasi karena berpotensi dapat mendistorsi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.
8. Pengaduan ke DKPP diprediksi akan meningkat setelah penetapan rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI, dengan agenda melanjutkan rapat Pada Hari Senin Tanggal 1 April 2024 dalam rangka evaluasi tahapan pemilu serentak tahun 2024, yaitu:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh Rakyat Indonesia; juga kepada Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, yang telah ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilihan Umum serentak tanggal 14 Februari 2024 yang secara umum berlangsung Aman, Tertib dan Damai.
2. Komisi II DPR RI ikut prihatin dan berbelas sungkawa terhadap masih adanya korban meninggal dunia dari para Penyelenggara Pemilu tahun 2024. Kita semua mendoakan, InsyaAllah mereka semua Syahid dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pejuang Demokrasi Indonesia.
3. Mencermati pelaksanaan Pemilu 2024 yang banyak sekali hal-hal yang perlu disempurnakan, sebagai bangsa yang besar dan ingin

terus maju ke depan, Komisi II DPR RI mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan menyempurnakan sistem Pemilu melalui revisi berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu dan Sistem Politik yang ada. Komisi II DPR mengusulkan waktu yang tepat untuk melakukan upaya tersebut di awal Periode Pemerintahan 2024-2029.

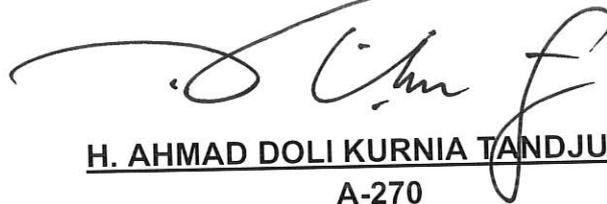
4. Mengikuti perkembangan Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang telah berjalan dan persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 yang akan datang, secara khusus Komisi II DPR RI menilai perlu memberikan catatan terhadap penyelenggara Pemilu yang akan datang, harus ada evaluasi dan dipastikan ke depan harus lahir para penyelenggara Pemilu yang berintegritas, memiliki kapasitas Kepemiluan yang baik, profesional, serta bertanggung jawab dan bekerja hanya untuk dan tidak ada kepentingan lain di atas kepentingan bangsa dan negara.
5. Komisi II DPR RI meminta agar DKPP RI dapat melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya secara Profesional, Tegas, Adil, dan Netral terhadap Penanganan aduan pelanggaran Kode Etik terhadap KPU dan Bawaslu selama proses penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 21.38 WIB.

Jakarta, 16 Mei 2024

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270